

Peran Kepemimpinan Direktur Bumdes "Hanyukupi" dalam Pengelolaan Obyek Wisata Water Byur di Kapanewon Ponjong

Widiya Ayu Saputri¹, Vivi Nursanti², Risna Mayvaa³, Hanifah Rohdyanti⁴, Dyah Indriyaningsih Septeri^{5*}

^{1,2,3,4,5} Administrasi Publik, Universitas Gunung Kidul, Wonosari, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:

Received Februari 04, 2025

Revised Maret 30, 2025

Accepted Mei 30, 2025

Kata Kunci:

Peran, Kepemimpinan, Bumdes, Water Byur

Keywords:

Leadership Role, Bumdes, Water Byur

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam pengelolaan Water Byur. Penelitian ini diharapkan menggali informasi mengenai bagaimana direktur BUMDes "Hanyukupi" mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mencari informasi untuk pengembangan unit usaha dan berkomunikasi dengan anggota serta pemangku kepentingan. Penelitian ini dilakukan dengan mengambil objek pengelolaan Water Byur yang berlokasi di Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah kualitatif deskriptif, untuk data yang digunakan terdiri dari dua sumber yaitu data primer dan data sekunder. Penentuan informan dilakukan dengan metode purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Direktur BUMDes "Hanyukupi" telah menunjukkan perannya dalam menjalankan tugas-tugas interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan yang penting untuk pengelolaan Water Byur, namun ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi meliputi karyawan yang belum sepenuhnya memahami tugas dan alur kerja. Pendapatan dan pengeluaran Water Byur yang hampir seimbang, letak di tengah desa menyebabkan permintaan akses masuk gratis bagi masyarakat lokal, lingkungan Water Byur perlu diperluas dan ditata ulang agar lebih menarik dan nyaman, serta perlu promosi yang lebih masif dan perlu biaya pemeliharaan yang memadai untuk menambah dan memperbaiki fasilitas wisata.

ABSTRACT

The purpose of this research is to understand the role of the director's leadership at BUMDes "Hanyukupi" in managing Water Byur. The study analyzes how the director of BUMDes "Hanyukupi" makes decisions, solves problems, seeks information for business unit development, and communicates with members and stakeholders. The research focuses on the management of Water Byur, located in Ponjong Hamlet, Ponjong Village, Gunungkidul Regency. This study employs a descriptive qualitative methodology, utilizing both primary and secondary data sources. Informants were selected using purposive sampling. Data collection techniques included observation, interviews, and documentation. The results of this research indicate that the Director of BUMDes "Hanyukupi" has demonstrated their role in performing essential interpersonal, informational, and decision-making tasks crucial for the management of Water Byur. However, several challenges need to be addressed, including employees not fully understanding their tasks and workflow. The revenue and expenditure of Water Byur are almost balanced, but its location in the village center leads to demands for free access by residents. Additionally, the Water Byur environment needs expansion and reorganization to be more attractive and comfortable. More extensive promotion and adequate maintenance costs are required to enhance and repair tourism facilities.

1. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia terus berupaya menggerakkan perekonomian desa, karena desa memainkan peran vital dalam pembangunan nasional (Putri & Rahmawati, 2024). Kapanta (2019) menyatakan bahwa desa merupakan basis kemasyarakatan bangsa Indonesia yang memiliki pondasi yang krusial bagi pengembangan politik, ekonomi, sosial, dan budaya di Indonesia (Ayuningtyas & Wibawani, 2022). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah dalam menggerakkan perekonomian melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa atau sering disingkat menjadi BUMDes. Pada dasarnya, BUMDes bukan merupakan hal yang baru, sebelum Undang-Undang tentang Desa di sahkan, BUMDes telah diatur dalam Pasal 213 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, memungkinkan desa untuk mendirikan badan usaha milik desa sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa (Alfiansyah, 2021). Sebagai lembaga sosial BUMDes berfungsi untuk mengutamakan kepentingan masyarakat serta pelayanan sosial, sedangkan dalam bentuk entitas komersial bertujuan untuk mengelola potensi desa supaya dapat memajukan perekonomian dan terdapat

*Corresponding author.

E-mail addresses: dyah.indriyaningsih@ugk.ac.id (Dyah Indriyaningsih Septeri)

peningkatan kesejahteraan masyarakat (Lewaherilla et al., 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa, pengertian BUMdes adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa (Permendesa PDTT, 2015). BUMDes dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa dan diharapkan dapat mengatasi masalah perekonomian desa dengan mengembangkan potensi melalui penyertaan modal secara langsung dari desa, bantuan pemerintah, dan masyarakat yang ingin bekerja sama dengan pembagian hasil yang adil (Se & Langga, 2021).

Badan Usaha Milik Desa, selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa. Pendirian BUM Desa bertujuan: a) meningkatkan perekonomian Desa, b) mengoptimalkan aset Desa agar bermanfaat untuk kesejahteraan Desa, c) meningkatkan usaha masyarakat dalam pengelolaan potensi ekonomi Desa, d) mengembangkan rencana kerja sama usaha antar desa dan/atau dengan pihak ketiga, e) menciptakan peluang dan jaringan pasar yang mendukung kebutuhan layanan umum warga, f) membuka lapangan kerja, g) meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui perbaikan pelayanan umum, pertumbuhan dan pemerataan ekonomi Desa, h) meningkatkan pendapatan masyarakat Desa dan Pendapatan Asli Desa (Permendesa PDTT, 2015).

Saat ini, sebagian besar desa yang ada di Indonesia telah mulai membentuk BUMDes untuk membantu perekonomian desa. Berdasarkan data Kemendesa PDTT terdapat 53.463 BUMDes yang telah dibentuk di Indonesia dengan 18.676 yang sudah berbadan hukum (BUMDes Kemendes, n.d.). Jumlah BUMDes tersebut tersebar di seluruh Indonesia tak terkecuali di wilayah Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dari rekam jejak lembaga yang ada Di Gunungkidul sudah terdapat beberapa BUMDes yang telah sukses memanfaatkan potensi yang dimiliki desa untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Salah satunya adalah BUMDes "Hanyukupi" Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul yang telah berdiri pada Bulan Desember tahun 2010 melalui SK Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2010. BUMDes tersebut telah berdiri kurang lebih 13 tahun dengan salah satu unit usaha yang paling sukses yaitu Water Byur. BUMDes "Hanyukupi" Kalurahan Ponjong beralamat di Komplek Water Byur Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong. Untuk saat ini terdapat tiga (3) unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes "Hanyukupi", yaitu Gedung Serbaguna Saemaul, Kandang Komunal yang saat ini fokus di pengembangan ternak sapi, dan unit usaha Water Byur. Istilah "Water Byur" sendiri adalah sebutan lain untuk water boom yang berada di Kalurahan Ponjong (Nilawati, 2018). Unit usaha Water Byur menjadi salah satu unit berbasis pariwisata yang dijalankan oleh BUMDes "Hanyukupi". Water Byur mempunyai ciri khas tersendiri karena merupakan kolam renang dengan sumber air asli, dengan pemandangan sawah yang menambah daya tarik tersendiri. Pada awalnya, dana pembangunan Water Byur berasal dari reward PNPM Mandiri karena Kalurahan Ponjong berhasil meraih juara ketiga lomba desa tingkat nasional pada tahun 2010. Sebagai penghargaan, Kalurahan Ponjong menerima dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan objek wisata Water Byur, yang kemudian didirikan pada tahun 2011.

Suksesnya unit usaha Water Byur tersebut tidak luput dari peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam pengelolaannya. Menurut Atmodiwirio (2006) dalam (Bashori et al., 2020) peran dapat didefinisikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan dari seseorang dalam posisi tertentu. Pemimpin dalam organisasi memiliki peranan tertentu, di mana setiap posisi mengandung harapan terhadap bagaimana individu tersebut harus bertindak atau berperilaku. Fakta menunjukkan bahwa organisasi mengidentifikasi pekerjaan yang harus dilaksanakan, dan perilaku peran yang diinginkan sejalan dengan pekerjaan tersebut. Ini juga berarti bahwa harapan peran penting dalam mengatur perilaku para bawahan. Jadi, peran kepemimpinan dapat diartikan sebagai serangkaian perilaku yang diharapkan dari seseorang sesuai dengan posisinya sebagai pemimpin. Adapun pendapat menurut Rivai menyatakan bahwa peran merupakan pengaturan perilaku seseorang dalam posisi tertentu, khususnya pemimpin organisasi, yang membawa harapan terhadap bagaimana perilaku penanggung jawab peran tersebut (Pertiwi & Atmaja, 2021). Sedangkan kepemimpinan merupakan sebuah upaya yang dilakukan untuk mempengaruhi orang lain dengan tujuan supaya orang tersebut memahami cara melakukan sesuatu yang benar dan efektif sehingga tujuan organisasi dapat tercapai. Didalam sebuah organisasi kepemimpinan mempunyai peran yang krusial dalam menentukan arah dan tujuan organisasi (Pertiwi & Atmaja, 2021). Kepemimpinan merupakan sebuah bentuk nyata dari jiwa pemimpin (Citraningsih & Novindari, 2022). Hal ini berarti bahwa kepemimpinan mencerminkan tindakan nyata dan perilaku yang diambil oleh seorang pemimpin, yang pada gilirannya mencerminkan karakter, nilai dan prinsip yang dimilikinya. Adanya kepemimpinan bertujuan untuk membimbing anggota dalam organisasi supaya melakukan

pekerjaan dengan baik, memberikan dukungan pada anggota sehingga menghasilkan kinerja dan produktifitas yang tinggi.

Menurut Edward Lyman Munson, kepemimpinan dimaknai sebagai kemampuan seseorang untuk mengarahkan orang lain sehingga mencapai hasil optimal dengan konflik yang minimal dan kerja sama yang maksimal. Sementara itu, Sondang P. Siagian mendefinisikan kepemimpinan sebagai keterampilan dan kemampuan seorang pemimpin dalam mempengaruhi tindakan orang lain, terutama mempengaruhi anggota di bawahnya, agar dapat berpikir dan bertindak positif untuk berkontribusi dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan (Hutahaean, 2021). Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah kemampuan untuk mempengaruhi orang lain dalam mencapai tujuan organisasi dengan menekankan pada kerja sama dan mengurangi konflik.

Menurut Sutrisno (2016) dalam (Rumayanto & Sanusi, 2022), peran pemimpin dapat di kategorikan dalam tiga bentuk, yaitu: a) Peranan yang bersifat interpersonal, salah satu tuntutan yang harus dipenuhi oleh seorang manajer ialah keterampilan insani. Keterampilan tersebut mutlak perlu karena pada dasarnya dalam menjalankan kepemimpinannya, seorang manajer berinteraksi dengan manusia lain, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan, yang dikenal dengan istilah stakeholder, didalam dan luar organisasi. Itulah yang dimaksud dengan peran interpersonal yang menampakkan diri. b) Peranan yang bersifat informasional, informasi merupakan aset organisasi yang kritical sifatnya. Dikatakan demikian karena di masa yang akan datang sukar membayangkan adanya kegiatan organisasi yang dapat terlaksana dengan efisien dan efektif tanpa dukungan informasi yang muthakir, lengkap dan dapat di percaya karena diolah dengan baik. c) Peranan pengambilan keputusan, peranan ini mengambil tiga bentuk suatu keputusan, yaitu sebagai interpreneur, seorang pemimpin diharapkan mampu mengkaji terus-menerus situasi yang dihadapi oleh organisasi. Sebagai peredam gangguan, kesedian memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif apabila organisasi menghadapi gangguan serius yang tidak dapat ditangani, dan sebagai pembagi sumber dana dan daya, wewenang atau kekuasaan itu paling sering menampakkan diri pada kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan daya.

Kepemimpinan memiliki dampak terhadap kesuksesan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Semakin efektif kepemimpinan yang diterapkan, semakin besar pula peningkatan kesuksesan usaha BUMDes (Taufik, 2023). Kepemimpinan yang dapat memotivasi anggota, berkomunikasi dengan efektif baik di dalam maupun di luar organisasi, serta memanfaatkan teknologi secara optimal akan berdampak positif pada efisiensi operasional dan pertumbuhan BUMDes (Suryanto et al., 2024). Berdasarkan penjelasan tersebut berarti kepemimpinan mempunyai peran yang penting dalam pengelolaan BUMDes, yang artinya direktur BUMDes memiliki tanggung jawab yang besar dalam memastikan keberhasilan dan keberlanjutan usaha. Karena keberhasilan direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam mengelola Water Byur dirasa perlu untuk mengkaji mengenai peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi". Penelitian ini, bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis bagaimana peran kepemimpinan direktur BUMdes "Hanyukupi" dalam pengelolaan Water Byur. Dengan menganalisis bagaimana direktur BUMDes "Hanyukupi" mengambil keputusan, menyelesaikan masalah, mencari informasi untuk pengembangan unit usaha dan berkomunikasi dengan anggota serta pemangku kepentingan. Informasi ini penting untuk memberikan wawasan tentang cara-cara praktis yang dapat diadopsi oleh pemimpin BUMDes lain untuk meningkatkan kinerja dan keberhasilan usaha.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Bogdan dan Taylor (1982) menyatakan bahwa penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari individu dan perilaku yang dapat diamati. Metode ini menggunakan teknik analisis mendalam (*in-depth analysis*), yaitu meneliti masalah secara spesifik dan rinci (Abdussamad, 2022). Dalam penelitian ini, mendeskripsikan secara nyata, sistematis, faktual, dan akurat terkait peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam pengelolaan Water Byur di Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul. Selanjutnya pada penelitian ini, penentuan informan menggunakan *purposive sampling* yaitu pemilihan informan dengan terdapat kriteria tertentu. Penelitian ini menggunakan Key Informan atau informan kunci yang terdiri dari Lurah Ponjong selaku penasehat BUMDes "Hanyukupi", Ulu-Ulu Kalurahan Ponjong selaku pengawas BUMDes "Hanyukupi", dan Direktur BUMDes "Hanyukupi". Selain itu ada informan utama yaitu Sekretaris BUMDes "Hanyukupi, dan yang terakhir informan pendukung yaitu pengelola Water Byur.

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini melalui observasi, menurut Marshall (1995) dalam (Rukajat, 2018), observasi memungkinkan kita untuk memahami perilaku dalam situasi sosial tertentu. Peneliti mengamati terkait peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi" serta pengelolaan Water Byur. Lalu wawancara, Herdiansyah (2013) dalam (Rukajat, 2018) menyatakan bahwa wawancara adalah

proses interaksi komunikasi antara minimal dua orang yang dilakukan secara alami. Pada penelitian ini wawancara dilakukan secara terstruktur dengan sebelumnya telah dibuat pedoman wawancara. Terakhir, pengumpulan data dengan dokumentasi adalah catatan tentang peristiwa yang telah terjadi. Pada penelitian ini didapatkan dokumentasi berupa foto dan dokumen lain yang berkaitan dengan BUMDes "Hanyukupi". Sumber data yang digunakan yaitu sumber primer dan sumber sekunder, sumber primer adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari informan yaitu melalui wawancara. Selanjutnya sumber sekunder adalah data yang diperoleh peneliti tidak secara langsung dari narasumber, pada penelitian ini berupa dokumen laporan pertanggung jawaban BUMDes "Hanyukupi" tahun 2023, profil singkat BUMDes "Hanyukupi", dan tata tertib Water Byur.

Analisis data yang digunakan menurut Miles & Huberman dalam (Fadli, 2021), menyatakan analisis data melibatkan tiga kegiatan utama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Teknik keabsahan data menggunakan triangulasi, menurut Sugiyono triangulasi adalah teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan menggabungkan berbagai metode pengumpulan data dan sumber data yang tersedia. Terdapat tiga jenis triangulasi yang diidentifikasi oleh Sugiyono, yaitu: triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan triangulasi waktu (Kurniawan et al., 2019). Pada penelitian ini peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan membandingkan data yang didapat dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta memiliki BUMDes bernama "Hanyukupi" yang berdiri pada bulan Desember Tahun 2010, dengan SK Kepala Desa Nomor : 06 Tahun 2010. Terbentuk secara resmi dengan nama BUMDes "Hanyukupi". BUMDes "Hanyukupi" Kalurahan Ponjong beralamat di Komplek Water Byur Kalurahan Ponjong, Kapanewon Ponjong. Untuk saat ini terdapat tiga (3) unit usaha yang dijalankan oleh BUMDes "Hanyukupi", yaitu Gedung Serbaguna Saemaul, Kandang Komunal yang saat ini fokus di pengembangan ternak sapi, dan unit usaha Water Byur. Istilah "Water Byur" sendiri adalah sebutan lain untuk water boom yang berada di Kalurahan Ponjong (Nilawati, 2018). Unit usaha Water Byur menjadi salah satu unit berbasis pariwisata yang dijalankan oleh BUMDes "Hanyukupi", Water Byur mempunyai ciri khas tersendiri karena merupakan kolam renang dengan sumber air asli, dengan pemandangan sawah yang menambah daya tarik tersendiri. Pada awalnya, dana pembangunan Water Byur berasal dari reward PNPM Mandiri karena Kalurahan Ponjong berhasil meraih juara ketiga lomba desa tingkat nasional pada tahun 2010. Sebagai penghargaan, Kalurahan Ponjong menerima dana sebesar Rp 1.000.000.000,00 yang digunakan untuk pembangunan objek wisata Water Byur, yang kemudian didirikan pada tahun 2011.

Unit usaha Water Byur diresmikan sejak tahun 2012 dibangun atas inisiasi dari Lurah dan Bamuskal juga bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPMKPPKB). Unit wisata Water Byur merupakan kolam renang baik untuk dewasa maupun anak-anak. Kolam renang untuk dewasa sendiri belum memenuhi standar kolam renang namun sudah bisa digunakan untuk belajar atau latihan dan untuk sekedar rekreasi. Di sekitar kolam renang sendiri dilengkapi dengan fasilitas gazebo, pendopo, taman kuliner, dan kolam renang dengan fasilitas tambahan seperti perosotan dan sumber air asli dari mata air yang ada di Kalurahan Ponjong. Letak Water Byur strategis karena berada di ruang terbuka dengan pemandangan sekitar sawah menjadikan ciri khas tersendiri dibandingkan kolam renang pada umumnya. Bangunan pendopo maupun gazebo bisa digunakan pengunjung untuk beristirahat, selain itu didalam maupun di luar kolam renang juga terdapat warung yang menjajakan makanan ringan dan minuman. Area Water Byur sendiri cukup luas, terdapat parkir yang memadai sehingga nyaman bagi pengunjung yang membawa kendaraan roda dua maupun roda empat. Sampai saat ini unit usaha Water Byur menjadi usaha yang paling sukses dibanding unit usaha BUMDes "Hanyukupi" yang lain. Meski sempat tutup selama kurang lebih dua (2) bulan di masa pandemi, sekarang Water Byur sudah beroperasi kembali dengan jumlah pengunjung bisa mencapai 300 pengunjung saat akhir pekan. Hal tersebut tidak lepas dari peran direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam mengelola unit usaha Water Byur supaya menjadi lebih nyaman dan menarik perhatian pengunjung. Water Byur menjadi unit usaha BUMDes "Hanyukupi" yang paling menguntungkan, berdasarkan laporan pertanggungjawaban tahun 2023, Sisa Hasil Usaha (SHU) yang berasal dari unit usaha Water Byur sebesar Rp. 73.123.300,00. SHU tersebut telah menyumbang Pendapatan Asli Kalurahan (PAK) sebesar Rp 29.249.320,00, lalu sisanya untuk pengembangan usaha BUMDes "Hanyukupi", untuk penasehat, pengawas, direksi, serta dana cadangan dan dana sosial.

Pembahasan

Direktur BUMDes “Hanyukupi” telah berperan dalam menata lingkungan wisata yang aman, tertib, bersih dan nyaman bagi pengunjung Water Byur, hal ini terlihat dari perawatan atau pemeliharaan yang dilaksanakan setiap hari Jumat dengan mencakup pembersihan area lingkungan Water Byur, selain itu dilakukan penataan di area parkir dan kolam renang supaya terlihat lebih bersih, indah, dan aman untuk meningkatkan kenyamanan pengunjung. Selanjutnya, di dalam Water Byur pedagang yang berjualan juga telah ditata dengan dibuat kios sehingga terlihat lebih rapi, bersih dan makanan maupun minuman yang jual lebih higienis. Perawatan yang teratur dan perbaikan fasilitas secara berkala tersebut meningkatkan pengunjung yang datang ke Water Byur. Perawatan dan pengelolaan yang baik tidak terlepas dari peran kepemimpinan direktur BUMDes “Hanyukupi”, berikut ini merupakan hasil temuan penelitian yang didapatkan mengenai peran kepemimpinan direktur BUMDes “Hanyukupi” dalam pengelolaan Water Byur:

Pertama, peranan yang bersifat interpersonal. Dalam konteks peranan yang bersifat interpersonal, Direktur BUMDes “Hanyukupi” sudah menunjukkan upaya yang cukup baik dalam membangun dan menjaga hubungan dengan karyawan dalam pengelolaan Water Byur. BUMDes “Hanyukupi” memiliki sistem open management sehingga semua anggota dari penasehat, pengawas, jajaran direksi, hingga karyawan tidak ada yang ditutupi. Menurut hasil wawancara yang telah peneliti lakukan, direktur BUMDes “Hanyukupi” setiap harinya selalu mengunjungi Water Byur untuk melakukan pemantauan langsung dalam pengelolaannya dan memantau kinerja dari karyawan Water Byur. Lalu, dalam menjaga hubungan baik antar anggota, direktur menjalankan tugasnya dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan yang melibatkan seluruh karyawan dan pengelola Water Byur. Dalam pertemuan tersebut diadakan briefing dan masukan baik dari jajaran direksi, pengawas, penasehat, maupun karyawan. Selain itu juga akan dilaksanakan pemberian tunjangan kinerja atau penghargaan kepada karyawan yang rajin dalam bentuk barang maupun uang. Tunjangan kinerja atau penghargaan tersebut dimaksudkan untuk memberikan motivasi sekaligus pemahaman bagi karyawan bahwa Water Byur adalah sumber pendapatan bagi karyawan yang turut mengelola sehingga diharapkan karyawan akan selalu meningkatkan kinerjanya.

Selain melalui penghargaan, peningkatan motivasi dan bimbingan pada karyawan juga dilakukan melalui pertemuan setiap 3 (tiga) bulan sekali, dimana nantinya karyawan akan diberi motivasi dengan mendatangkan motivator maupun dari dinas atau kapanewon. Direktur BUMDes “Hanyukupi” dalam hal ini juga melaksanakan tugasnya dalam mengevaluasi kinerja karyawan, karena pertemuan triwulan tersebut juga dilakukan untuk melakukan evaluasi kinerja. Pertemuan tersebut juga dilakukan untuk melakukan analisis dan tindak lanjut program kerja dan pelaksanaan program kerja.

Selanjutnya dalam melaksanakan peran interpersonal seorang direktur juga diharuskan berinteraksi dengan orang lain, bukan hanya dengan para bawahannya, akan tetapi juga berbagai pihak yang berkepentingan yang dikenal dengan istilah stakeholder. Dalam hal ini menjaga hubungan baik dengan pemerintah kalurahan dilakukan melalui pertemuan rutin yang selalu dihadiri oleh Lurah Ponjong selaku penasehat dan Ulu-Ulu selaku pengawas. Kemudian dengan selalu memperhatikan pendapat dari pihak kalurahan untuk menghindari terjadinya konflik. Selain itu, direktur BUMDes “Hanyukupi” dalam melaksanakan program kerjanya maupun kegiatan yang akan dilakukan selalu sejalan dengan aturan yang telah dibuat Pemerintah Kalurahan Ponjong, sehingga hubungan antara Pemerintah Kalurahan Ponjong dan BUMDes “Hanyukupi” terjalin dengan baik.

Namun masih terdapat permasalahan yang terjadi antar karyawan yang mengelola unit usaha Water Byur, berupa kurangnya kerjasama diantara karyawan serta karyawan yang belum tanggap terhadap kondisi dan pekerjaan. Hal tersebut menyebabkan kadang-kadang ada pos-pos yang kosong, yang dapat mengurangi kualitas pelayanan. Selain itu, gaji karyawan yang masih jauh dari Upah Minimum Regional (UMR) menyebabkan menurunnya kinerja karyawan.

Kedua, peranan yang bersifat informasional. Direktur BUMDes “Hanyukupi” memiliki peran penting dalam menyampaikan, mencari, dan memberikan informasi yang relevan dan dapat diandalkan untuk memastikan pengelolaan yang efisien dan efektif. Direktur BUMDes “Hanyukupi” sudah bertanggung jawab dalam menyampaikan informasi mengenai kebijakan dan strategi pengelolaan Water Byur kepada karyawan dan pemangku kepentingan lainnya. Penyampaian tersebut melalui pertemuan bersama jajaran direksi, pengawas, dan Pemerintah Kalurahan Ponjong yang dilakukan secara rutin setiap tiga bulan sekali dan rapat akhir tahun, maupun saat terjadi rapat insidental yang memerlukan pihak Pemerintah Kalurahan Ponjong untuk menghadiri.

Selanjutnya untuk penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan melalui media sosial, dinas instansi, biro travel, sampai pembuatan iklan. Kemudian juga melalui pengunjung yang memiliki pengaruh besar di media sosial. Pengunjung yang dipilih biasanya adalah mereka yang memiliki akun dengan banyak pengikut, yang dapat membantu memperluas jangkauan promosi. Setelah kunjungan, direktur BUMDes

akan mengajak untuk berdiskusi mengenai pendapat mereka tentang pengelolaan Water Byur. Pendapat tersebut kemudian diposting ke media sosial, hal itu memungkinkan masyarakat untuk memberikan umpan balik secara langsung. Selain itu, direktur BUMDes "Hanyukupi" juga aktif mencari informasi yang relevan untuk meningkatkan pengelolaan Water Byur. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan mendengarkan usulan dan ide dari karyawan.

Direktur BUMDes "Hanyukupi" memainkan peran sebagai juru bicara dalam menyampaikan informasi kepada pihak luar, seperti pada BUMDes lain yang melakukan studi banding. Berdasarkan penilaian, direktur telah melakukan tugas ini dengan cukup baik. Menjadi narasumber dalam studi banding dari luar daerah tidak hanya membantu dalam berbagi pengetahuan dan pengalaman, tetapi juga memperkuat reputasi Water Byur sebagai destinasi wisata yang dikelola dengan baik.

Secara keseluruhan, peran informasional dari direktur BUMDes "Hanyukupi" sangat penting dalam memastikan keberhasilan pengelolaan Water Byur. Melalui penyampaian informasi dan mencari informasi yang relevan, direktur dapat memastikan bahwa Water Byur dikelola dengan baik dan tetap relevan dengan kebutuhan serta harapan masyarakat. Informasi yang akurat dan terpercaya menjadi dasar bagi semua kegiatan organisasi, sehingga memungkinkan Water Byur untuk terus berkembang menjadi lebih baik lagi kedepannya. Direktur BUMDes "Hanyukupi" sendiri mempunyai kemampuan yang baik dalam hal komunikasi dengan pihak internal BUMDes maupun eksternal, sehingga tidak terdapat kendala dalam melakukan komunikasi tersebut.

Ketiga, peranan pengambilan keputusan. Peran pengambilan keputusan ini meliputi tiga bentuk utama yaitu sebagai intreprenur, peredam gangguan, dan pembagi sumber dana dan daya. Sebagai intreprenur pemimpin diharapkan mampu terus-menerus mengkaji situasi yang dihadapi organisasi. Dalam hal ini direktur BUMDes "Hanyukupi" khususnya dalam pengelolaan Water Byur, memberikan tugas setiap harinya pada karyawan pengelola Water Byur untuk berkeliling di setiap lokasi wilayah kolam untuk melakukan pengecekan mengenai kondisi infrastruktur Water Byur. Jika ada kerusakan maka akan dilaporkan pada direktur untuk segera mendapatkan tindak lanjutnya. Pengecekan kondisi infrastruktur kolam renang membuktikan bahwa direktur telah melaksanakan tugasnya dalam hal mengadakan studi kelayakan bersama pengurus yang lain dan ketua unit pengelola. Selanjutnya jika terdapat kondisi dimana harus segera mengambil keputusan, maka direktur akan bekerja sama dengan jajaran direksi, pengawas dan pemerintah kalurahan, namun jika tidak terlalu mendesak maka pengambilan keputusan hanya akan melibatkan sebagian anggota dengan diputuskan sendiri oleh direktur BUMDes.

Selanjutnya pemimpin dalam peran pengambilan keputusan juga berbentuk sebagai peredam gangguan, maksudnya pemimpin harus siap memikul tanggung jawab untuk mengambil tindakan korektif saat organisasi menghadapi gangguan serius. Dalam konteks peran kepemimpinan direktur BUMDes "Hanyukupi" dalam pengelolaan Water Byur, peran sebagai peredam gangguan seperti saat terdapat kecelakaan kecil di area kolam renang maka pihak pengelola akan segera membawa korban ke puskesmas untuk diberi pengobatan dan di biayai menggunakan dana dari BUMDes. Untuk keluhan lain biasanya akan ditampung terlebih dahulu melalui penampungan aspirasi atau keluhan dari pengunjung yang nantinya akan dijadikan masukan apabila diperlukan adanya pembenahan terkait masalah atau kritikan dari masyarakat tersebut. Direktur BUMDes "Hanyukupi" telah menekankan pentingnya respons cepat dan tanggap terhadap keluhan. Ini menunjukkan komitmen terhadap pelayanan yang cepat dan penyelesaian masalah secara efektif.

Kemudian sebagai pembagi sumber dana dan daya, pemimpin memiliki kekuasaan untuk mengalokasikan dana dan sumber daya. Dalam hal ini direktur telah melakukan perannya dengan membagi sumber daya manusia yang ada, hal tersebut terbukti dari telah tersusunnya pembagian tugas karyawan yang mengelola Water Byur, sudah terdapat job description dan tata kerja berupa SOP (Standar Operational Procedure) yang dibuat bagi masing-masing karyawan sehingga tidak ada tumpang tindih pekerjaan, namun antar karyawan diharuskan saling membantu apabila memerlukan bantuan.

Dalam pengambilan keputusan mengenai pengelolaan Water Byur, direktur menyusun program kerja bersama dengan jajaran pengurus. Keputusan-keputusan terkait alokasi dana serta program-program yang direncanakan dilakukan melalui musyawarah antar jajaran direksi BUMDes yang kemudian disetujui oleh Lurah Ponjong. Dalam perencanaan program juga disesuaikan dengan dana yang dimiliki, lalu jika karyawan memberikan usulan terkait ide pengembangan Water Byur diluar dari konsep yang dibuat oleh jajaran direksi, maka ide tersebut akan dipertimbangkan dengan membuat layoutnya terlebih dahulu lalu akan dipaparkan kepada pemerintah kalurahan dengan mengundang pendamping kalurahan yang selanjutnya akan dibuat kesepakatan. Usulan tersebut tidak hanya sekedar diterima tapi juga ada yang terealisasi seperti pembuatan air mancur, tangga, dan prosotan di kolam renang.

Selanjutnya dalam pengambilan keputusan terkait dengan dana, alokasi Sisa Hasil Usaha (SHU) telah sesuai dengan ketentuan yaitu 40% untuk Pendapatan Asli Kalurahan (PAK), 25% untuk pengembangan usaha BUMDes, 5% untuk penasehat, 7,5% untuk pengawas, 17,5% untuk direksi BUMDes, dan 5% untuk

dana cadangan dan dana sosial. Kemudian terkait dengan pemberian gaji kepada karyawan dilakukan setiap 1 (satu) bulan sekali dengan pemberian gaji setiap tanggal 5 (lima). Dalam pelaksanaan program juga bergantung pada ketersediaan dana, jika dana belum mencukupi maka program yang telah direncanakan belum dapat terealisasi.

Selain melaksanakan ketiga peran yang telah dijelaskan, Direktur BUMDes juga telah melaksanakan tugasnya dalam menyusun laporan secara periodik dan berkala serta menyusun laporan dan melaporkan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ). Namun, meski direktur telah melakukan tugas dan perannya sebagai pemimpin BUMDes, masih terdapat beberapa permasalahan yang harus dihadapi. Dalam konteks kinerja karyawan, masih terdapat karyawan yang mengelola unit usaha Water Byur belum bisa memahami sepenuhnya terkait dengan tugas pokok dan fungsinya. Selain itu, belum semua karyawan memahami struktur pekerjaan atau alur kerja yang dilaksanakan. Hal tersebut tentunya menjadi penghambat dalam pengelolaan Water Byur.

Permasalahan lain dalam unit usaha Water Byur berupa banyaknya pendapatan dan pengeluaran yang hampir sama. Water Byur, merupakan usaha yang paling banyak menyumbang pendapatan bagi BUMDes dan Kalurahan, namun pengeluaran yang dilakukan untuk biaya pengelolaan hampir sama banyaknya, seperti untuk biaya listrik, penggantian air, filter air, dan lain sebagainya. Selanjutnya karena letak Water Byur yang ada di tengah desa, menyebabkan masyarakat meminta masuk ke tempat wisata secara gratis, meski sudah pernah diberikan solusi berupa aturan setiap hari Kamis bebas tiket masuk untuk anak-anak yang berdomisili Kalurahan Ponjong, namun hal tersebut juga tidak efektif karena banyak terjadi penipuan. Selanjutnya terdapat permasalahan lain yaitu pada lingkungan Water Byur yang perlu diperluas dan ditata ulang sedemikian rupa sehingga menjadi lebih indah dan asri, serta memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengunjung. Lalu, sarana bermain dan alat permainan yang tersedia terkesan sederhana dan stagnan, yang sering kali menimbulkan rasa bosan bagi para pengunjung juga menjadi permasalahan yang dihadapi. Lalu, promosi yang lebih masif kepada masyarakat juga perlu dilakukan agar lebih banyak orang yang mengetahui dan tertarik untuk mengunjungi Water Byur. Tidak kalah pentingnya, biaya pemeliharaan fasilitas yang kecil menjadi tantangan tersendiri. Diperlukan dana yang cukup besar untuk menambah dan memperbaiki fasilitas wisata, baik untuk sarana bermain maupun alat permainan, agar Water Byur dapat terus berkembang dan menarik lebih banyak pengunjung.

4. SIMPULAN

Kesimpulannya, Direktur BUMDes "Hanyukupi" telah menunjukkan perannya dalam menjalankan tugas-tugas interpersonal, informasional, dan pengambilan keputusan yang penting untuk pengelolaan Water Byur. Dalam peran interpersonal, direktur berhasil membangun hubungan yang baik dengan karyawan melalui sistem manajemen terbuka dan pertemuan rutin, serta memberikan penghargaan untuk meningkatkan motivasi. Di sisi informasional, direktur berperan aktif dalam menyampaikan dan mencari informasi yang relevan kepada karyawan maupun masyarakat melalui berbagai media dan pertemuan. Sebagai pengambil keputusan, direktur berhasil mengkaji situasi, meredam gangguan, dan mengalokasikan sumber daya dengan baik, meskipun masih menghadapi tantangan dalam pemahaman karyawan terkait tugas dan alur kerja. Namun, tantangan utama yang perlu dihadapi ke depan meliputi karyawan yang belum sepenuhnya memahami tugas dan alur kerja. Pendapatan dan pengeluaran Water Byur hampir seimbang, dengan biaya pengelolaan yang tinggi. Letak di tengah desa menyebabkan permintaan akses masuk gratis bagi masyarakat lokal. Selanjutnya, lingkungan Water Byur perlu diperluas dan ditata ulang agar lebih menarik dan nyaman, promosi yang lebih masif dan biaya pemeliharaan yang memadai diperlukan untuk menambah dan memperbaiki fasilitas wisata.

Adapun beberapa saran untuk mengatasi permasalahan dalam pengelolaan Water Byur, yaitu a) direktur mengadakan pelatihan tambahan bagi karyawan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang tugas dan alur kerja, b) melakukan analisis yang lebih mendalam tentang pendapatan dan pengeluaran untuk mengidentifikasi peluang peningkatan efisiensi dan penghematan biaya, c) mengembangkan kebijakan akses yang adil dengan menerapkan sistem tiket masuk yang terjangkau atau subsidi bagi warga lokal, d) mencari sponsor dari bisnis lokal yang dapat memberikan bantuan dana atau material untuk pengembangan fasilitas, e) mengembangkan strategi promosi yang lebih kreatif termasuk penggunaan media sosial, kerjasama dengan agen wisata, dan mengadakan event atau aktivitas khusus secara berkala untuk menarik lebih banyak pengunjung dan meningkatkan loyalitas pelanggan.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Abdussamad, Z. (2022). *Buku Metode Penelitian Kualitatif*.
- Alfiansyah, A. (2021). Status Badan Usaha Milik Desa Sebagai Badan Hukum Atas Diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(2).
- Ayuningtyas, D. D., & Wibawani, S. (2022). Peran Badan Usaha Milik Desa (Bumdesa) Dalam Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Kebijakan Publik*, 13(3), 281–286.
- Bashori, B., Chaniago, Z. I., Oktaviani, M., & Tamin, B. (2020). Peran Kepemimpinan Di Lembaga Pendidikan Islam. *PRODU: Prokurasi Edukasi Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, 2(1).
- BUMDes Kemendes. (n.d.). BUM desa. Retrieved from bumdes.kemendes: <https://bumdes.kemendes.go.id/>
- Citraningsih, D., & Noviandari, H. (2022). Interaksionisme Simbolik: Peran Kepemimpinan Dalam Pengambilan Keputusan. *Social Science Studies*, 2(1), 72–86.
- Fadli, M. R. (2021). Memahami desain metode penelitian kualitatif. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(1), 33–54.
- Hutahaean, W. S. (2021). *Teori Kepemimpinan Dr. Wendy Sepmady Hutahaean, SE, M. Th.* Malang: Ahlimedia Press.
- Kurniawan, A. R., Chan, F., Abdurrohman, M., Wanimo, O., Putri, N. H., Intan, F. M., & Samosir, W. L. S. (2019). Problematika guru dalam melaksanakan program literasi di kelas IV Sekolah Dasar. *Edustream: Jurnal Pendidikan Dasar*, 3(2), 31–37.
- Lewaherilla, N. C., Ralahallo, F. N., & Loppies, L. S. (2022). Revitalisasi Tata Kelola menuju Bumdes Produktif pada Bumdes Tanjung Siput Ohoi Lairngangas di Kabupaten Maluku Tenggara. *Amalee: Indonesian Journal of Community Research and Engagement*, 3(2), 331–341.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi (Permendesa PDTT) Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan Dan Pengelolaan, Dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
- Pertiwi, N., & Atmaja, H. E. (2021). Literature Review: Peran Kepemimpinan Dalam Manajemen Perubahan Di Organisasi. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis (EK Dan BI)*, 4(2), 576–581.
- Putri, F. D. W., & Rahmawati, R. (2024). Pemberdayaan Perekonomian Masyarakat Desa Jubung Melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). *Jurnal Kewirausahaan Cerdas Dan Digital*, 1(3), 68–81.
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan penelitian kualitatif (Qualitative research approach)*. Deepublish.
- Rumayanto, T., & Sanusi, S. N. S. N. (2022). Pengaruh Kepemimpinan Terhadap Kinerja Tenaga Pendidik Pada Fakultas Teknik Universitas Jakarta. *Jurnal Widya Persada*, 1(1), 22–36.
- Se, H., & Langga, L. (2021). Peranan BUMDes dalam Mendukung Perekonomian dan Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Watusipi Kecamatan Ende Kabupaten Ende. *RESONA: Jurnal Ilmiah Pengabdian Masyarakat*, 5(1), 75–86.
- Suryanto, A. S. M. P., Firdaus, V., & Abadiyah, R. (2024). Pengaruh Kepemimpinan Transformasional, Komunikasi, dan Penggunaan Teknologi terhadap Kinerja Bumdes yang ada pada Kecamatan Tanggulangin. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 5(1), 1150–1165.
- Taufik, R. (2023). Pengaruh Kepemimpinan Dan Manajemen Bumdes Terhadap Keberhasilan Usaha Bumdes Syari'ah Usaha Bersama Desa Mahato Sakti. *Jurnal Ilmiah Cano Ekonomos*, 12(2), 44–51.